

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak (Sari dan Afriyanti, 2008). Akan tetapi, sumber dana dari dalam negeri lebih diutamakan daripada luar negeri, dimana memberikan alternatif yang sangat potensial dalam peningkatan dana dalam negeri. Karena Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Fitriana dan Saputra, 2009).

Ditengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi yang mana hal ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi global yang makin memperburuk situasi ekonomi Indonesia, kenyataannya ditengah situasi ekonomi Indonesia

dewasa ini tidak stabil pembangunan tetap harus berjalan dan permasalahan-permasalahan baik di bidang ekonomi ataupun dibidang lain harus segera diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia (Sari, 2009).

Supaya dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi dan secara perlahan mampu melepaskan ketergantungan bantuan dari luar negeri yaitu seperti bantuan dari *World Bank* atau IMF, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Saat ini sedang digali berbagai macam potensi terutama meningkatkan potensi penerimaan dalam negeri dibandingkan dengan mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara (Sari,2009).

Pemasukan pajak diharapkan akan terus meningkat dengan melakukan upaya-upaya seperti membuat kebijakan-kebijakan ekstensifikasi dengan cara meningkatkan obyek pajak dan jumlah pajak, serta intensifikasi perpajakan yang mengacu pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak seperti adanya penyuluhan langsung pada masyarakat, sunset policy, dan sebagainya.

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara, diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimiliki dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam sektor pajak terdapat dua

penggolongan pajak, dari pajak langsung seperti pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai, bea balik nama, bea materai. Dari beberapa jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki potensi terbesar dan menjadi harapan pemerintah dalam peningkatan Wajib Pajak maupun Penerimaan Pajaknya .

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Undang-undang yang digunakan untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-undang No. 17 tahun 2000. Undang-undang pajak telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment system* (Sari, 2009). Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar melalui media SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran Pajak). SPT digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SSP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk menyetor pajak terutang ke bank, kemudian pihak bank berkoordinasi dengan KPP dengan menyerahkan SSP tersebut sebagai arsip, berarti SSP sebagai tanda bukti Wajib pajak telah membayar pajak yang disetorkan ke bank. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penerapan *self assessment sytem* adalah PPh Pasal 25.

Dengan adanya program ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan jenis objek pajak. Disertai dengan keberadaan program intensifikasi pemungutan pajak dapat meningkat dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, meningkatkan upaya penegakan hukum serta upaya dalam penyempurnaan sistem administrasi pajak. Jadi dengan sistem pemungutan pajak ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

KPP Pratama Surakarta adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, situasi kerja dan manajemen yang baik dan juga mencakup wilayah kerja yang luas. Berdasarkan hal tersebut, Surakarta memiliki potensi yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang ingin dicapai, sehingga adanya KPP Pratama Surakarta penting untuk dapat menyerap potensi pajak yang ada.

Berdasarkan argumen tersebut maka ditetapkan judul yaitu:
“PENGARUH FAKTOR *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) SURAKARTA” dan penelitian ini mereplikasi dari Lidya Purnama Sari yang berjudul “Pengaruh Self

Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” yang dibedakan menurut lokasi penelitian yang dilakukan dan periode waktu penelitian.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta?
2. Apakah Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.
2. Mengetahui apakah Jumlah SSP PPh pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan pengaruh *self assessment* system terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Surakarta
2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
3. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta mengenai Sistematika Pembahasan berupa uraian-uraian singkat dari bab-bab skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjabarkan tentang teori-teori dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian, identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan, gambaran umum penelitian, hasil pengujian asumsi, serta pengujian hipotesis yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini disajikan beberapa kesimpulan yang diambil dari analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab IV. Selain itu juga dikemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.